



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PERGERAKAN SOSIAL KARMA NIRVANA TERHADAP  
KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS DALAM MENANGGULANGI  
FENOMENA *HONOUR KILLING* DI PAKISTAN TAHUN 2003 - 2015**

Estu Sarwo Mukti

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

This research has the focus point on the explanation of transnational crime named honour killing did by Pakistani immigrants in United Kingdom. Honour killing happens due to patriarchy community who has a culture of honour and shame that discriminate women in order to be responsible to maintain the honour in the family. This issue has been advocated by Karma Nirvana as a social movement organization which eventually impacted in the creation of United Kingdom government policy to mitigate the problem. The aim of this research is to answer the question on what are the factors that affect social movement of Karma Nirvana towards United Kingdom government policy on mitigating honour killing in Pakistan during 2003 to 2015. In order to answer that, researcher uses the approach of liberal feminism and resource mobilization theory. The method used for this research is qualitative with explanative type and data collected by interview and literature review. The result of this research has proven that the factor affected social movement of Karma Nirvana towards United Kingdom government policy are the utilization of resource in the form of formal organization and the use of honour killing and forced marriage issues which are in line with the priority of United Kingdom government.

**Keywords:** *honour killing, forced marriage, Karma Nirvana, resources, policy*

**PENDAHULUAN**

Perempuan masih sering kali dimarginalkan dalam persoalan kesetaraan gender. Hal ini dibuktikan melalui laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) yang menyatakan bahwa hingga tahun 2014, tingkat *Gender Inequality Index* (GII) rata-rata berkisar antara 2,1% hingga 73,3%. (hdr.undp.org, 2014). Penelitian ini membahas praktik *honour killing* yang dilakukan oleh imigran Pakistan di Inggris. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa *honour killing* terjadi atas dasar sistem patriarki yang diperparah dengan adanya budaya hormat dan rasa malu dalam masyarakat (*honour and shame*) yang kemudian menjadikan kehormatan keluarga di atas segala-galanya (Peristiany, 1966: 22). Patriarki sendiri merupakan budaya yang dibangun di atas dasar struktur dominasi dan sub ordinasi yang mengharuskan hierarki di mana laki-laki dan pandangan laki-laki menjadi suatu norma (Hardwick, 1962: 56). Berdasarkan *International Resource Centre*, dari 5000 kejadian *honour killing* per tahun yang terjadi di dunia, 1000 di antaranya terjadi di India dan 1000 lainnya terjadi di Pakistan (Honour Based Violence Awareness Network, 2015). Setidaknya terdapat 12 kasus *honour killing* yang terjadi di Inggris setiap tahunnya (bbc.co.uk, 2014). Beberapa

kasus di Inggris yang paling banyak mendapat publikasi adalah pembunuhan Shafiea Ahmed pada tahun 2003 dan Banaz Mahmud pada tahun 2006. Fakta ini digunakan oleh Karma Nirvana untuk meningkatkan perhatian masyarakat dan pemerintah di Inggris.

Pada tahun 2007, Pemerintah Inggris membuat kebijakan yang mengkriminalisasi tindak pemaksaan dalam pernikahan sebagai bentuk kepedulian terhadap salah satu faktor yang mendorong terjadinya kasus *honour killing*. Pada tahun 2013, Pemerintah Inggris juga memberikan *UK aid* yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan perempuan lainnya. Melalui *Department for International Development (DFID)* (gov.uk, 2015).

Penulis menemukan fakta menarik mengenai pemanfaatan kasus kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia oleh pergerakan Karma Nirvana dengan *honour killing* sebagai isu yang diangkat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yakni faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan sosial Karma Nirvana terhadap kebijakan Pemerintah Inggris dalam menanggulangi fenomena *honour killing* di Pakistan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2015.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *liberal feminism* dan *resource mobilization theory*. Menurut Mary Wollstonecraft pada tahun 1792 melalui bukunya yang berjudul *A Vindication of the Rights of Woman*, perempuan dan laki-laki harus mendapatkan edukasi secara adil dan diperlakukan setara sebagai sesama umat manusia (Ruffcorn, 2015). Pendekatan feminisme liberal juga sangat menekankan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (Steans, 2006: 172). Menurut kaum feminis liberal, cara yang dianggap paling efektif untuk mengatasi permasalahan diskriminasi gender adalah dengan menghilangkan hambatan-hambatan dalam mencapai kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan (Devtak & Burke, 2008: 81). Pendekatan feminisme liberal juga menyatakan bahwa melalui mekanisme hukum dan perpolitikan yang legal, kaum perempuan mampu mengubahnya menjadi justifikasi yang akan membawanya pada pencapaian keadilan serta kesetaraan gender (Stacks & Salwen, 2009).

Teori *resource mobilization* menyatakan bahwa pembentukan organisasi secara formal merupakan hal pertama dan paling penting untuk dilakukan dalam pergerakan sosial. Hal ini dikarenakan organisasi yang dibentuk tentunya memiliki sumber daya yang lebih terorganisir untuk kemudian dapat dimanfaatkan dalam upaya pencapaian tujuan tertentu (American Journal of Sociology, 1997: Vol. 82, No. 6). Interaksi antarorganisasi formal kemudian menjadi kunci keberhasilan gerakan sosial tersebut dalam mencapai tujuan politisnya (Kendall, 2005: 531). McAdam menjelaskan bahwa teori *resource mobilization* menekankan pada signifikansi kuatnya dasar suatu organisasi, akumulasi sumber daya yang dimiliki, dan koordinasi kolektif terhadap para pelaku politik atau elit (McAdam *et al.*, 2001: 15). Selain itu, unsur penting lain yang harus dimiliki organisasi tersebut adalah pergerakan yang sifatnya dinamis, strategi untuk melakukan interaksi dengan pihak atau organisasi lain, dan respon aktif terhadap kondisi perpolitikan yang terjadi di wilayah terkait (McAdam *et al.*, 2001: 16). Della Porta dan Diani menjelaskan bahwa sumber daya yang dimiliki suatu organisasi baik berupa uang maupun semangat kerja yang sifatnya sukarela harus mampu menetralkan hambatan yang datang dari pihak penentang organisasi tersebut dan mampu meningkatkan dukungan yang didapatkan baik dari masyarakat umum maupun para elit politik (Della Porta & Diani, 2006: 137).

## **PEMBAHASAN**

### *Sejarah dan Perkembangan Fenomena Honour Killing*

Nilai-nilai yang memberikan justifikasi terhadap penghukuman perempuan oleh keluarganya sudah diimplementasikan pada zaman Romawi Kuno ketika laki-laki pemimpin

keluarga diberikan hak untuk membunuh anak perempuan atau istrinya yang dipercaya melakukan zina (Goldstein, 2002: 28). Semenanjung Arab sejak zaman Ottoman menganggap perempuan memberikan aib besar bagi keluarganya yang tidak mungkin dikembalikan ketika perempuan kehilangan keperawanannya sebelum menikah (dalam Mbogoni, 2013: 152). Fakta menunjukkan bahwa *honour killing* juga ditemukan di daratan Cina sejak masa dinasti Ching (hbv-awareness.com, 2016). Saat itu masyarakat sudah memiliki konstruksi sosial bahwa seorang ayah maupun suami memiliki hak untuk menghukum pihak perempuan dalam keluarga baik anak maupun istri yang dianggap telah menodai kehormatan keluarganya. Di Amerika Selatan, suku-suku pedalaman seperti Aztec dan Inka di sana menerapkan hukuman mati bagi para perempuan yang diduga melakukan perbuatan zina (Goldstein, 2002: 29). Fenomena *honour killing* pada masa abad pertengahan juga ditemukan di wilayah Albania di mana hukum yang disebut sebagai *Kanun Leke Dukagjini* mengizinkan tindak pembunuhan yang dilakukan terhadap perempuan yang telah berzina (hbv-awareness.com, 2016). Saat ini, *honour killing* paling banyak terjadi di India dan Pakistan dengan prosentase yang seimbang.

Selama periode tahun 1990 hingga 2002, kepolisian Pakistan melaporkan sebanyak 1.844 perempuan menjadi korban *honour killing* dan sebagian besar berlokasi di wilayah perbatasan utara dan barat negara Pakistan (Knudsen, 2004: 13). Berdasarkan laporan Pemerintah Pakistan di tahun 2015, kepolisian Provinsi Khyber Pakhtunkhwa melaporkan bahwa sebanyak 45 dari 3.240 kasus pembunuhan yang terjadi selama satu tahun merupakan praktik *honour killing* (Asylum Research Consultancy, 2015). Kejadian yang selalu dianggap memalukan dan tidak dapat ditoleransi adalah ketika seorang perempuan kehilangan kesuciannya. Hal ini termasuk perbuatan zina, percintaan atau pernikahan yang tidak disetujui oleh keluarga, maupun hanya sebatas tindakan yang dinilai menggoda lawan jenis (Pierre, 1977: 14). *Honour killing* dipilih masyarakat Pakistan sebagai mekanisme penghukuman yang paling efektif dibandingkan dengan diceraikan atau diasingkan dari pergaulan dalam masyarakat karena perceraian dan pengasingan merupakan situasi yang dianggap memalukan bagi keluarganya (Tapper dan Tapper, 1992: 11).

Salah satu pemicu terbesar yang menjadi justifikasi sebagian besar pelaku *honour killing* adalah ketika korbannya dianggap membawa aib bagi keluarga karena tidak menyetujui perjodohan yang dipaksakan (*forced marriage*). *Forced marriage* juga memiliki keterkaitan dengan salah satu faktor pendorong lain terjadinya *honour killing*, yakni perceraian. Sebagaimana yang terjadi di Belanda, dari 3029 kasus perceraian sebanyak 737 atau 27% disebabkan oleh *forced marriage* (Chester, 2012: 120). Umumnya perempuan yang dijodohkan secara paksa tidak semuanya berani untuk menolak sejak awal. Namun, bukan berarti pernikahan akan terus berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah direncanakan. Sebagai contoh dalam kasus Samia Sarwar pada akhirnya menjadi korban *honour killing* setelah dirinya berupaya untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Kasus ini menjadi salah satu kasus yang paling banyak dipublikasikan karena Samia tetap dianggap bersalah meskipun suami yang ingin diceraikannya tersebut sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam budaya komunitas yang mengimplementasikan nilai *honour and shame* seperti di Pakistan, perceraian dianggap memalukan karena hal ini berarti membuka permasalahan atau aib yang ada dalam ranah rumah tangga terhadap masyarakat luas (Muller dan Lindholt, 2005: 109). Sering kali perempuan yang tidak disetujui keluarganya untuk bercerai, memutuskan untuk melarikan diri dari rumah. Hal ini dianggap sebagai justifikasi yang paling mudah karena tidak hanya kedua orang tuanya yang merasa dipermalukan, namun hal ini juga berlaku bagi seluruh anggota keluarga yang lain termasuk saudara kandungnya (Quah, 2015: 89). Meskipun terjadi kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat sering kali mengabaikan hal tersebut. Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, fakta semacam ini terbukti mendapatkan pengaruh yang kuat dari nilai-nilai budaya patriarki dalam

masyarakat yang mempertahankan hierarki gender sehingga laki-laki dianggap wajar apabila melakukan agresi atau penyerangan terhadap perempuan sekalipun itu istrinya sendiri (Das, 2013: 81).

Selain perceraian, zina (*adultery*) juga merupakan salah satu penyebab lain dari *honour killing*. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Turki pada tahun 2005, sebanyak 37% responden mengatakan bahwa pelaku perbuatan zina pantas untuk dibunuh (news.bbc.co.uk, 2005). Sebagaimana perceraian, zina juga memiliki keterkaitan sebagai dampak dari perkawinan paksa. Dalam kasus Samia Sarwar dijelaskan bahwa meskipun awalnya menerima perjodohan, Samia pada akhirnya memutuskan untuk melarikan diri bersama kekasih sebelumnya. Meskipun perjodohan ini bukan keinginan pihak perempuan, pada akhirnya mereka tetap disalahkan dan dianggap merusak nama baik keluarga.

Faktor lain yang mendorong seseorang menjadi korban *honour killing* adalah ketika seorang perempuan diperkosa. Kondisi di mana perempuan tersebut kehilangan keperawanannya sebelum menikah atau dapat dikatakan telah berhubungan seksual di luar ikatan pernikahan inilah yang menjadi alasan korban pemerkosaan dianggap membawa aib bagi keluarganya, terutama dalam kasus hingga perempuan ini hamil (bbc.co.uk, 2011).

Salah satu faktor yang juga sering mendapat perhatian adalah perempuan korban memiliki orientasi seksual sesama jenis (homoseksual) bahkan tidak hanya orientasi seksual yang dinilai salah oleh masyarakat, ketika seorang perempuan menampilkan ekspresi gender yang berlainan maka hal tersebut juga dapat dianggap merusak kehormatan dan nama baik keluarga (Bjorling, 2015: 78). Pernyataan ini juga diperkuat oleh laporan *United Nations High Commissioner for Refugees* tahun 2008 mengenai klaim pengungsi terhadap orientasi seksual dan identitas gender (UNHCR, 2008: 13). Hal ini berkaitan dengan *honour killing* karena jika perempuan berpenampilan seperti laki-laki akan dianggap menyalahi kodrat dan menjadi aib bagi keluarga.

Beberapa kasus *honour killing* yang dilakukan oleh komunitas imigran Pakistan di Inggris di antaranya adalah kasus yang menimpa Samaira Nazir dan Sabia Rani. Pada 23 April 2005 Samaira Nazir tewas dibunuh oleh kakak laki-lakinya (Azhar Nazir) dan sepupu laki-lakinya (Imran Mohammed) dengan 18 kali tusukan menggunakan empat bilah pisau ke tubuhnya (Sanghera, 2007). Hal ini karena Samaira menolak dijodohkan. Fakta yang paling ironis dari kejadian ini adalah tindakan pembunuhan tersebut dilakukan di depan anggota keluarga Samaira yang lain, termasuk dua orang keponakannya yang masih berusia dua dan empat tahun (Benson dan Stangroom, 2009: 26). Pada bulan Mei 2006 Sabia Rani dibunuh oleh suaminya dengan cara dipukuli hingga 90% tubuhnya memar parah dan 15 tulang rusuknya patah (telegraph.co.uk, 2008). Hal ini dilakukan karena Sabia mengajukan gugatan perceraian terkait kekerasan dalam rumah tangga.

#### *Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi Formal Sebagai Kekuatan Memengaruhi Kebijakan Pemerintah Inggris*

Untuk meningkatkan perhatian masyarakat, Karma Nirvana memperlopori kampanye yang dilakukan di berbagai media massa dalam rangka menyadarkan masyarakat bahwa *honour killing* adalah suatu tindak kejahatan yang sangat tidak manusiawi. Setidaknya terdapat enam media nasional sebagai partner yang namanya terpampang dalam *website* Karma Nirvana yakni *The Telegraph*, *Cosmopolitan*, *The Independent*, *BBC News*, *The Times*, dan *The Statesmen* (karmanirvana.org.uk, 2016). Salah satu bentuk kampanye Karma Nirvana dibuktikan melalui terbitan Huffington Post tanggal 14 Juli 2015 berisi gambar yang memvisualisasikan bagaimana Shafiea Ahmed dibunuh oleh kedua orang tuanya di depan adik dan kakaknya sendiri dengan cara disekap menggunakan kantong plastik yang mengakibatkan dirinya kehabisan udara hingga akhirnya tidak lagi bernafas. Selain itu, Karma Nirvana meminta partisipasi masyarakat untuk menggunggah pesan singkat dengan

menggunakan *hashtag* #RememberShafilea melalui media sosial *twitter*. Setelah kampanye menggunakan sosial media, Karma Nirvana dan Cosmopolitan berhasil mendapatkan perhatian publik melalui kampanye *cover* majalah dengan wajah Shafilea. Hasil dari kampanye tersebut tercatat telah ditayangkan media sebanyak 28,5 juta kali dan telah disaksikan oleh sebanyak 220 penonton (dma.org.uk, 2015). Salah satu pencapaian lain dari kampanye tersebut adalah pembuatan patung tiga dimensi berbentuk wajah Shafilea Ahmed.

Alasan munculnya gerakan kampanye yang dipelopori oleh Karma Nirvana tersebut pada dasarnya dapat dianalisis dengan menggunakan *liberal feminism*. Pendekatan feminisme menggunakan pandangan yang cenderung subjektif dengan sumber-sumber yang berasal dari masyarakat biasa yang hidupnya ternyata sangat dipengaruhi oleh hasil-hasil kebijakan yang dibuat oleh para penguasa (Aitken & Valentine, 2014: 113) Jasvinder Sanghera yang merupakan pendiri sekaligus *Chief Executive Officer* (CEO) dari Karma Nirvana merupakan salah satu penyintas yang berhasil bangkit setelah menjadi korban *forced marriage* (karmanirvana.org, 2016). Hal ini membuktikan bahwa latar belakang berdirinya organisasi dan gerakan Karma Nirvana sesuai dengan paradigma feminisme.

Upaya Karma Nirvana untuk melakukan lobi terhadap Pemerintah Inggris merupakan pembuktian atas pandangan kaum feminisme liberal yang menyatakan bahwa melalui mekanisme hukum dan perpolitikan yang legal, kaum perempuan mampu mengubahnya menjadi justifikasi yang akan membawanya pada pencapaian keadilan serta kesetaraan gender (Stacks & Salwen, 2009).

Melalui berbagai upaya advokasi yang telah dilakukan, akhirnya Pemerintah Inggris memberlakukan beberapa kebijakan dalam rangka menanggulangi fenomena *honour killing*. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya adalah *Forced Marriage (Civil Protection) Act* tahun 2007, pelaksanaan inspeksi secara rutin oleh *Her Majesty's Inspectorate of Constabulary* (HMIC), pembentukan komite khusus yang menangani kekerasan dalam rumah tangga oleh *The House of Commons Home Affairs* dan disebutkan bahwa kasus *honour killings* termasuk di dalamnya, penyelenggaraan kampanye dan konsultasi publik dalam skala nasional bernama "*Together We Can End Violence against Women and Girls*" tahun 2009 oleh *The House of Commons Home Affairs*. Selain itu, *The Office for the Children's Commissioner* bekerjasama dengan *Forced Marriage Commission* juga menyediakan akses untuk pemulihan kondisi korban pernikahan paksa di bawah umur, pembentukan *Honour Based Violence Working Group* oleh *The Association of Chief Police Officers* bersama *Force Marriage United*. Beberapa kebijakan luar negeri terhadap Pakistan juga turut diimplementasikan seperti pemberian dana bantuan bagi Pemerintah Pakistan oleh *Department for International Development* dalam menanggulangi fenomena *honour killing*, pelaksanaan program *partnership* antara Kepolisian Sindh dengan *UK aid Prevention of Honour Killing Project* di Pakistan tahun 2009, serta dukungan Pemerintah Inggris kepada *Acid Survivor Foundation* untuk meloloskan tiga tahapan legislatif terkait perlindungan hukum bagi para korban *honour based violence*, yakni *Criminal Law Amendment, comprehensive Acid* dan *Burn Crime Bill, Acid Control Bill* pada tahun 2013.

Karma Nirvana turut berkontribusi dalam mendorong Pemerintah Inggris untuk membuat kebijakan-kebijakan tersebut. Organisasi ini mengumpulkan petisi dan berhasil mengumpulkan dukungan dalam bentuk tanda tangan yang jumlahnya mencapai 100.000 buah, melakukan presentasi di depan parlemen bersama Cosmopolitan dan Henry Jackson Society, serta mengadakan jajak pendapat melalui kartu pos yang berhasil mendapatkan sebanyak 2500 respon, 98% di antaranya mendukung pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut (Julios, 2015: 82).

Tim Karma Nirvana sendiri terbagi menjadi dua kategori besar, yakni dewan pengawas (*board of trustees*) dan staf. Di samping struktur keorganisasian internal, Karma Nirvana juga memiliki seorang pelindung hukum yang secara eksternal mengayomi organisasi ini.

Pelindung tersebut adalah Marilyn Mornington yang merupakan hakim mahkamah daerah di Inggris, pemateri internasional, dan seorang penulis dalam hal hukum keluarga termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) (Pritchard, 2008: 244). Salah satu strategi Karma Nirvana adalah optimalisasi *website* serta jaringan komunikasi lainnya seperti telepon dan surat baik elektronik maupun pos yang semuanya terjamin kerahasiaannya. Karma Nirvana juga mengadakan tujuh program kerja utama, yakni bantuan pengaduan melalui telepon (*helpline*), pelatihan (*training*), edukasi bagi para kaum muda (*KN Youth*), beragam jenis kampanye (*campaigns*), beragam jenis kegiatan terkait (*events*), *roadshow*, dan laporan berkala (*newsletter*) (karmanirvana.org.uk, 2016).

Struktur keorganisasian dan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Karma Nirvana dalam menanggulangi permasalahan *honour killing* tersebut lebih jauh dapat dianalisis menggunakan teori *resource mobilization*. Teori yang merupakan bagian dari pendekatan *Social Movement* ini menyatakan bahwa pembentukan organisasi secara formal merupakan hal pertama dan paling penting untuk dilakukan dalam mencapai tujuan pergerakan sosial. Hal ini dikarenakan organisasi yang dibentuk tentunya memiliki sumber daya yang lebih terorganisir untuk kemudian dapat dimanfaatkan dalam upaya pencapaian tujuan tertentu (American Journal of Sociology, 1997: Vol. 82, No. 6). Teori *resource mobilization* menekankan bahwa untuk mencapai suatu tujuan maka perlu dirancang strategi untuk membentuk suatu pergerakan sosial secara lebih rasional dalam bentuk institusi formal (Buechler, 2011). Dengan alasan yang sama, Karma Nirvana terbentuk.

Dalam bukunya yang berjudul *Dynamics of Contention*, McAdam menjelaskan bahwa teori *resource mobilization* menekankan pada signifikansi kuatnya dasar suatu organisasi, akumulasi sumber daya yang dimiliki, dan koordinasi kolektif terhadap para pelaku politik atau elit (McAdam *et al.*, 2001: 15). Menganalisis poin pertama dalam premis teori tersebut, suatu organisasi pergerakan sosial akan berhasil dalam mencapai tujuannya ketika memiliki dasar organisasi yang kuat. Karma Nirvana didirikan pada tahun 1993 oleh Jasvinder Sanghera CBE yang merupakan seorang penyintas yang mampu bangkit dari masa lalunya sebagai korban praktik *forced marriage* dan *honour based abuse* (yorkshirepost.co.uk, 2011). Pengalaman pribadinya tersebut menjadikan Jasvinder tergerak untuk melakukan upaya terbaiknya agar perempuan-perempuan lain tidak perlu merasakan penderitaan seperti dirinya. Dengan kata lain sejak awal berdirinya, Karma Nirvana sudah didasarkan atas prinsip solidaritas dan sukarela. Kuatnya visi dan semangat juang yang sama ini menjadi kekuatan sumber daya tersendiri bagi Karma Nirvana secara keorganisasian internal.

Setelah organisasi dengan dasar yang kuat terbentuk, komposisi terpenting setelah itu adalah pemanfaatan sumber daya yang harus dimilikinya. Teori *resource mobilization* menjelaskan bagaimana sekelompok orang dengan pemikiran yang rasional memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik berupa uang, keterampilan, maupun sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama yang sifatnya spesifik (Harter, 2011: 9). Fakta mengenai Jasvinder Sanghera sebagai pimpinan Karma Nirvana sudah menjadi kelebihan tersendiri bagi organisasi ini. Jasvinder merupakan penyintas yang memiliki pengalaman pribadi terkait *forced marriage* dan *honour based violence* yang mana hal ini secara subjektif akan terus memotivasi dirinya untuk melakukan langkah maksimal dalam menentukan arah organisasi tersebut. Selain itu, Jasvinder yang menceritakan pengalaman pribadinya tersebut melalui buku yang berjudul "Shame" ini juga merupakan pembicara dalam forum internasional dan penasihat ahli untuk pengadilan kasus terkait. Kontribusinya dalam menyadarkan masyarakat sekaligus pemerintah akan isu ini dianggap penting dalam mendorong terbentuknya kebijakan untuk mengkriminalisasi tindakan *forced marriage* sebagaimana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Inggris, David Cameron.

Selain faktor kepemimpinan, sumber daya lain yang juga mendukung Karma Nirvana dalam mencapai tujuannya adalah terdapatnya struktur organisasi formal dengan pembagian

tugas yang jelas dan koordinasi kolektif antara badan pengawas dan jajaran staf. Selain kuatnya dasar organisasi dan pemanfaatan sumber daya, salah satu hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah loyalitas. Unsur loyalitas dikatakan memiliki tiga dimensi, yakni jumlah sumber daya yang dimiliki, jarak sumber daya yang dapat dilibatkan, dan keadaan yang memungkinkan sumber daya tersebut dapat digerakkan (Tilly, 1978: 70). Loyalitas berbanding lurus dengan *outcome* yang dihasilkan. Dalam hal ini, loyalitas sumber daya yang dimiliki oleh Karma Nirvana dapat terlihat dari beragam pencapaian yang telah dijelaskan sebelumnya seperti keberhasilan kampanye dan terbentuknya konstitusi yang mengkriminalisasi tindak *forced marriage* pasca petisi yang disampaikan kepada pemerintah Inggris.

Faktor terakhir yang memengaruhi pergerakan Karma Nirvana terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Inggris adalah interaksi. Interaksi itulah yang kemudian menjadi kunci keberhasilan gerakan sosial tersebut dalam mencapai tujuan politisnya (Kendall, 2005: 531). Terkait hal tersebut, Karma Nirvana melalui berbagai macam kegiatan yang dilakukannya secara langsung telah menciptakan interaksi positif dengan institusi terkait seperti sekolah, rumah sakit, hingga kepolisian pusat dan wilayah. Selain itu Karma Nirvana juga aktif menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi pergerakan lainnya seperti Soroptimist International ([soroptimistinternational.org](http://soroptimistinternational.org), 2015). Jasvinder juga melakukan upaya advokasi yang dimulai dengan pendekatan kepada partai-partai politik di Inggris dimana David Cameron merupakan pimpinan kabinet saat itu.

Selain itu, pola-pola isu yang digunakan oleh Karma Nirvana tidak bertentangan dengan pandangan pemerintah Inggris. Kedua isu yang diangkat sejak awal, baik *honour killing* maupun *forced marriage* memang bukan hal yang dianggap baik dan perlu untuk dipertahankan. Hal inilah yang menyebabkan Karma Nirvana cenderung terbantu untuk mengadvokasikan kepentingannya terhadap Pemerintah Inggris dengan lebih mudah. Sebagai implikasi berikutnya, premis yang menyatakan bahwa respon aparat kepolisian cenderung negatif pada sebagian besar pergerakan sosial juga terbukti tidak sepenuhnya benar karena isu yang digunakan sesuai dengan prioritas kepentingan Pemerintah Inggris.

## PENUTUP

Karma Nirvana menggunakan strategi pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Hal tersebut mulai dari struktur keorganisasian internal maupun eksternal, optimalisasi jaringan *website* dengan berbagai fitur yang memudahkan para korban *forced marriage* dan *honour based violence* untuk melaporkan kasusnya, dan termasuk di dalamnya layanan *helpline*. Karma Nirvana juga melakukan beragam aktivitas mulai dari pelatihan, *roadshow*, hingga kampanye untuk memperluas jaringan interaksi dengan pihak-pihak eksternal seperti media massa, lembaga penelitian, dan organisasi pergerakan lain untuk memengaruhi kebijakan pemerintah Inggris.

Karma Nirvana telah melakukan beragam upaya hingga akhirnya bisa mengadvokasikan isu *forced marriage* dan *honour killing* ini kepada pemerintah Inggris. Pemanfaatan relasi yang dilakukan Karma Nirvana secara spesifik adalah kerjasama yang dibentuknya bersama organisasi pergerakan lainnya seperti *Soroptimist International*, lembaga penelitian seperti *The Henry Jackson Society*, hingga pemanfaatan jaringan melalui media massa nasional di Inggris dan kampanye yang aktif dilakukannya melalui media sosial. Dalam advokasi pembuatan kebijakan, Karma Nirvana juga terlibat dalam prosesnya dengan cara mengumpulkan dukungan dari masyarakat melalui metode petisi *online* yang dijadikan kekuatan untuk memberikan dorongan bagi pemerintah.

Selain itu, kesimpulan yang istimewa dari penelitian ini adalah hasil yang membuktikan bahwa isu yang digunakan oleh kelompok pergerakan sosial juga menjadi salah satu sumber daya yang penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya upaya advokasi yang dilakukan

oleh organisasi tersebut. Hal ini diperlihatkan oleh Karma Nirvana yang mengangkat isu *honour killing* dan *forced marriage* yang pada dasarnya sejalan dengan prioritas pemerintah Inggris untuk menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia.

## Referensi

- Are Knudsen (2004). License to Kill: Honour Killings in Pakistan. *Working Paper*. Chr Michelsen Institute Development Studies and Human Rights.
- Benson, Ophelia dan Jeremy Stangroom. (2009). *Does God Hate Women?*. London: Bloomsbury Publishing.
- Bjorling, Bam. (2015). *Honour Related Violence: Prevention of Violence against Women and Girls in Patriarchal Family*. Stockholm: Kvinnoforum.
- Bourdieu, Pierre. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- British Broadcasting Corporation. (2005). Honour Crime Defiance in Turkey. Dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4357158.stm>. Dirilis pada 19 Oktober 2005.
- British Broadcasting Corporations. (2011). Libya Rape Victims Face Honour Killing. Dalam <http://www.bbc.com/news/world-africa-13760895>. Dirilis pada 14 Juni 2011.
- Buechler, Steven M. (2011). *Understanding Social Movements: Theories from the Classical Era to the Present*. Columbia: Paradigm Publishers.
- Chester, Robert. (2012). *Divorce in Europe*. Berlin: Springer Science and Business Media.
- Das, Chaitali. (2013). *British-Indian Adult Children of Divorce: Context, Impact and Coping*. Surrey: Ashgate Publishing.
- Della Porta, Donatella dan Mario Diani. (2006). *Social Movements: An Introduction*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Devtak, Richard dan Anthony Burke. (2008). *An Introduction to International Relations: Australian Perspective*. New York: Cambridge University Press.
- Direct Marketing Association. (2015). 2015 Gold Best Design or Art Direction. Dalam <http://dma.org.uk/awards/winner/2015-gold-best-design-or-art-direction>. Dirilis pada 1 Desember 2015.
- Foreign and Commonwealth Office. (2015). Pakistan-Country of Concern. Dalam <https://www.gov.uk/government/publications/pakistan-country-of-concern/pakistan-country-of-concern#womens-rights>. Dirilis pada 21 Januari 2015.
- Goldstein, Matthew A. (2002). The Biological Roots of Heat-of-Passion Crimes and Honor Killings. *Politics and the Life Sciences*, 21 (2): pp. 28-37.
- Hardwick, Julie. (1962). *The Practice of Patriarchy*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- Harter, John-Henry. (2011). *New Social Movements, Class, and the Environment*. Newcastle: Cambridge Scholar Publishing.
- Honour based Violence Awareness Network. (2015). Statistic and Data. Dalam <http://hbv-awareness.com/statistics-data/>. Diakses pada 5 September 2015.
- Honour based Violence Awareness Network. (2016). Statistic and Data. Dalam <http://hbv-awareness.com/statistics-data/>. Diakses pada 5 Juni 2016.
- Julios, Dr Christina. (2015). *Forced Marriage and 'Honour' Killings in Britain: Private Lives, Community Crimes and Public Policy Perspectives*. Surrey: Ashgate Publishing.
- Karma Nirvana. (2016). Jasvinder Sanghera CBE. Dalam <http://www.karmanirvana.org.uk/jasvinder-sanghera/>. Diakses pada 21 Maret 2016.
- Karma Nirvana. (2016). Remember Shafiea. Dalam <http://www.karmanirvana.org.uk/remembershafiea/>. Diakses pada 21 Maret 2016.
- Kendall, Diana Elizabeth. (2005). *Sociology in Our Times: The Essentials*. California: Wadsworth Publishing.

- Lindholt, Lone dan Sten Schaumburg-Müller. (2005). *Human Rights in Development Yearbook 2003*. Oslo: Martinus Nijhoff Publishers.
- Mbogoni, Lawrence E. Y. (2013). *Aspects of Colonial Tanzania History*. Montana: African Books Collective.
- McAdam, Douglas, Sidney Tarrow, Charles Tilly. (2001). *Dynamics of Contention*. New York: Cambridge University Press.
- Oonagh Gay. (2015). *Forced Marriage*. Home Affairs Section: SN/HA/1003. *Pakistan Country Report*. (2015). Cambridge: Asylum Research Consultancy.
- Peristiany, John George. (1996). *Honour and Shame: The Values of Mediterranean Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Pritchard, Jacki. (2008). *Good Practice in the Law and Safeguarding Adults: Criminal Justice and Adult Protection*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Quah, Sharon Ee Ling. (2015). *Perspective on Marital Dissolution : Divorce Biographies in Singapore*. Singapore: Springer.
- Ruffcorn, Ryan E. (2015). Liberal Feminism. Dalam <http://pages.uoregon.edu/munno/OregonCourses/REL408W03/REL408TongSummaries/Ryan-Tong.htm>. Diakses pada 16 September 2015.
- Sanghera, Jasvinder. (2007). *Shame, Daughters of Shame & Shame Travels*. London: Hodder & Stoughton.
- Soroptimist International UK Programme Action Committee. (2015). Forced Marriage and Honour Killing. Dalam <http://www.ukpac.org.uk/articles/forced-marriage-and-honour-killing>. Diakses pada 13 Desember 2015.
- Stacks, Don W dan Michael B. Salwen. (2009). *An Integrated Approach to Communication Theory and Research*. New York: Routledge. (American Journal of Sociology, 1997: Vol. 82, No. 6)
- Steans, Jill. (2006). *Gender and International Relations: Issues, Debates and Future Directions*. Cambridge: Polity Press.
- Tapper, Richard dan Nancy Tapper. (1992). Marriage, Honour and Responsibility: Islamic and Local Models in the Mediterranean and the Middle East. *Cambridge Anthropology*, 16 (2): pp. 3-21.
- The Telegraph. (2008). Family Guilty of 'Allowing Wife's Death'. Dalam <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1577643/Family-guilty-of-allowing-wifes-death.html>. Dirilis pada 5 Februari 2008.
- Tilly, Charles. (1978). *From Mobilization to Revolution*. New York: Newbery Award Records.
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2008). *UNHCR Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity*. Geneva: The UN Refugee Agency.
- United Nations Development Programme. (2015). Gender Inequality Index. Dalam <http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii>. Diakses pada 9 Juli 2015.
- Yorkshire Post. (2008). Leeds Family Failed to Help Murdered Wife, Court Told. Dalam <http://www.yorkshirepost.co.uk/news/leeds-family-failed-to-help-murdered-wife-court-told-1-2486277#ixzz40CV1jBEem>. Dirilis pada 7 Januari 2008.